

STUDI KASUS HUKUM

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS PERKARA TINDAK PIDANA
PENIPUAN DALAM USAHA DISTRIBUSI DENGAN SISTEM SKEMA PIRAMIDA**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 836/Pid.Sus/2020/PN Sby)

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Rangka Memperoleh Gelar Sarjana*

OLEH :

DIAN ANJELINA HERLINS

2110112005

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)



Pembimbing:

Yandriza, S.H, M.H.

Riki Afrizal, S.H, M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No.Reg : 07/PK. IV/I/2026

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM USAHA DISTRIBUSI DENGAN SISTEM SKEMA PIRAMIDA

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 836/Pid.Sus/2020/PN Sby)

*Dian Anjelina Herlins, 2110112005, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Khusus Hukum
Pidana (PK IV), Halaman i-87, Tahun 2025,
Pembimbing Yandrizza, S.H., M.H. dan Riki Afrizal, S.H., M.H.*

ABSTRAK

Tindak pidana penipuan dalam usaha distribusi dengan skema piramida merupakan praktik bisnis ilegal yang memperoleh keuntungan bukan dari penjualan barang atau jasa, melainkan dari biaya partisipasi anggota baru sebagaimana dilarang dalam Pasal 9 dan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Oleh karena itu menjadi perhatian bagi Peneliti untuk mengkaji tentang putusan bebas pada putusan ini. Rumusan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus bebas perkara tindak pidana penipuan investasi pada Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2020/PNSby. 2) Bagaimana proses pembuktian terhadap perkara tindak pidana penipuan investasi pada Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2020/PNSby?. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan kasus serta sumber data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa putusan bebas didasarkan pada penilaian majelis hakim yang menyatakan unsur-unsur pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi. Hakim berpendapat bahwa kegiatan Memiles merupakan layanan periklanan sehingga tidak termasuk dalam kategori usaha distribusi yang menerapkan skema piramida. Selain itu, hakim menilai unsur “melawan hukum” dalam Pasal 378 KUHP tidak terbukti secara meyakinkan. Namun, hasil analisis penulis menemukan adanya sejumlah kelemahan dalam pertimbangan hakim, antara lain diabaikannya fakta bahwa terdakwa juga pernah melakukan tindak pidana yang serupa dalam perkara penipuan investasi pada tahun 2015, tidak dipertimbangkannya kerugian nyata yang dialami para korban, serta tidak optimalnya penilaian terhadap barang bukti dan pola perekrutan berjenjang yang secara substantif memenuhi karakteristik skema piramida. Proses pembuktian yang dilakukan juga dinilai tidak sejalan dengan prinsip pembuktian negatif menurut Pasal 183 KUHP karena majelis hakim tidak memberikan bobot memadai terhadap alat bukti yang secara kumulatif telah menunjukkan adanya praktik penghimpunan dana ilegal. Putusan ini turut menciptakan ketidakpastian hukum dan berpotensi menjadi preseden yang melemahkan penegakan hukum terhadap kejahatan investasi berbasis skema piramida di Indonesia.

Kata Kunci: Penipuan, Skema Piramida, Putusan Bebas

JURIDICAL REVIEW OF THE ACQUITTAL IN A CRIMINAL FRAUD CASE IN DISTRIBUTION BUSINESS USING A PYRAMID SCHEME SYSTEM

(Case Study of the Surabaya District Court Judgment Number 836/Pid.Sus/PN.Sby)

*Dian Anjelina Herlins, 2110112005, Faculty of Law, Andalas University, Special Program in Criminal Law (PK IV), Page i-87, Year 2025,
Supervisors: Yandriza, S.H., M.H. and Riki Afrizal, S.H., M.H.*

ABSTRACT

The criminal act of fraud in distribution businesses using a pyramid scheme is an illegal business practice in which profits are obtained not from the sale of goods or services, but from participation fees paid by newly recruited members, as prohibited under Article 9 and Article 105 of Law Number 7 of 2014 concerning Trade. Therefore, this acquittal decision becomes a matter of concern for the researcher to examine. The research questions in this study are: (1) What are the legal considerations of the panel of judges in acquitting the defendant in the criminal investment fraud case in Judgment Number 836/Pid.Sus/2020/PN Sby? and (2) How was the evidentiary process conducted in the criminal investment fraud case in Judgment Number 836/Pid.Sus/2020/PN Sby? To address these issues, the author employs a normative juridical method with a statutory approach and a case approach, using secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings of this study show that the acquittal was based on the judges' assessment that the elements of the articles charged by the Public Prosecutor were not fulfilled. The judges argued that Memiles' activities constituted advertising services and therefore did not fall under the category of distribution businesses applying a pyramid scheme. In addition, the judges concluded that the "unlawful conduct" element in Article 378 of the Criminal Code was not convincingly proven. However, the author's analysis identifies several weaknesses in the judges' considerations, including the disregard of the fact that the defendant had previously committed a similar investment fraud crime in 2015, the failure to consider the actual losses suffered by the victims, and the inadequate assessment of evidence and tiered recruitment patterns that substantively meet the characteristics of a pyramid scheme. The evidentiary process carried out was also deemed inconsistent with the negative proof system under Article 183 of the Criminal Procedure Code, as the judges did not give sufficient weight to the cumulative evidence indicating the existence of illegal fundraising practices. This decision further creates legal uncertainty and has the potential to become a precedent that weakens law enforcement against pyramid scheme-based investment fraud in Indonesia.

Keywords: Fraud, Pyramid Scheme, Acquittal